

### **BAB III**

## **RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

### **3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH**

Menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah, tentunya berpedoman pada arah kebijakan ekonomi nasional. Arah kebijakan ekonomi nasional sesuai dengan Tema RKP Tahun 2021 (RPJMN 2019-2024) : **“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”**, menetapkan sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2021, antara lain Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,5 persen; Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,0-9,0 persen; IPM menjadi 72,5; gini rasio pada kisaran 0,375-0,380; dan tingkat pengangguran terbuka 4,7-5,1 persen;

Data pertumbuhan ekonomi nasional, turun dari 5,17% ditahun 2018 menjadi 5,02% ditahun 2019, peningkatan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh perbaikan ekonomi global yang mendorong perbaikan nilai ekspor, pendapatan yang berpengaruh pada konsumsi rumah tangga dan juga pertumbuhan investasi yang semakin meningkat. Dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 sebesar 5,41% dengan pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha industri dan pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta informasi dan komunikasi sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi oleh Konsumsi Rumah Tangga diikuti oleh ekspor barang dan jasa.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi regional pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal mengalami peningkatan menjadi 5,58% dibandingkan tahun 2018 yaitu 5,51%, jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal masih lebih tinggi. Terkait hal tersebut maka arah kebijakan pembangunan ekonomi kabupaten Tegal tahun 2021 guna mendukung target pertumbuhan sebesar 5,53 % diarahkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah dengan asumsi daya beli masyarakat yang meningkat, iklim investasi yang kondusif, dukungan ketersediaan infrastruktur, nilai tambah industri semakin meningkat, dan kualitas belanja pemerintah serta penyerapan anggaran yang membaik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan domestik regional bruto (PDRB) Jawa Tengah pada tahun ini diproyeksikan tak sesuai dengan ekspektasi, menyusul rontoknya sejumlah indikator perekonomian daerah itu akibat serangan virus corona atau *COVID-19*. Hasil kajian yang dilakukan Bank Indonesia (BI) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah baru-baru ini memperkirakan skenario paling ekstrem pertumbuhan ekonomi Jateng tahun ini hanya tumbuh di kisaran 2,8%. Angka ini jauh dari proyeksi awal di kisaran 5,8%.

Penyebaran *COVID-19* yang semakin masif mempengaruhi perekonomian Kabupaten Tegal terutama pada sisi perdagangan dan konsumsi rumah tangga. Berdasarkan hasil kajian Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal melalui diskusi dengan berbagai pelaku usaha di sektor-sektor contributor utama perekonomian Eks Karesidenan Pekalongan, penyebaran virus *COVID-19* memberikan dampak pada terbatasnya persediaan bahan baku dan penundaan pesanan.

#### **3.1.1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Tegal**

Distribusi PDRB menurut pengeluaran pada hakikatnya merupakan komponen pendukung, pembentuk atau penyumbang PDRB. Bila mengacu pada teori pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi  $(Y) = \text{Konsumsi } (C) + \text{Investasi } (I) + \text{Belanja Pemerintah } (G) + (\text{Ekspor} - \text{Impor} / X - M)$ , maka komponen pengeluaran PDRB Kabupaten Tegal yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga.

Proyeksi perekonomian daerah Kabupaten Tegal tahun 2021 selengkapnya sebagai berikut.

**Tabel 3.1.**  
**Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Tegal**

NO	Indikator	Target	
		Tahun 2020	Tahun 2021
1.	PDRB/PDB :		
	Atas dasar harga berlaku	35.231.687,56	41.670.308,15
	Atas dasar harga konstan	24.866.727,91	27.265.018,81
2.	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,48	5,53
3.	Inflasi (persen)	2-4%	2-4%
4.	PDRB/Kapita atas dasar harga berlaku		
5.	Nilai Investasi PMA	500 Miliar	520 Miliar
	Nilai Investasi PMDN	850 Miliar	875 Miliar
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)	7,45	7,2
7.	Kemiskinan (persen)	7,01	6,64

Sumber : RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024

COVID-19 memberikan tantangan bagi upaya mendorong momentum pertumbuhan ekonomi domestik. Melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi dunia menurunkan prospek pertumbuhan ekspor barang Indonesia. Ekspor jasa terutama terutama sektor pariwisata diperkirakan juga menurun akibat terhambatnya mobilitas antar daerah sejalan dengan upaya memitigasi resiko perluasan COVID-19. Berikut proyeksi perekonomian daerah terdampak COVID-19 Kabupaten Tegal tahun 2021.

**Tabel 3.2.**  
**Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Terdampak COVID-19 Kabupaten Tegal**

NO	Indikator	Target	
		Tahun 2020	Tahun 2021
1.	PDRB/PDB :		
	Atas dasar harga berlaku	36.288.639,19	38.066.781,46
	Atas dasar harga konstan	25.612.729,75	26.867.753,50
2.	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	2,8% - 3,2%	4,9%-5,3%
3.	Inflasi (persen)	2-4%	2-4%
4.	PDRB/Kapita atas dasar harga berlaku		
5.	Nilai Investasi PMA	465 Miliar	500 Miliar
	Nilai Investasi PMDN	790 Miliar	820 Miliar
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)	8,45	8,05
7.	Kemiskinan (persen)	8,01	7,90

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2019 \*) Proyeksi

Proyeksi pertumbuhan komponen pengeluaran PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2020 sebagai berikut.

**Tabel 3.3.**  
**Proyeksi Pertumbuhan Komponen Pengeluaran PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2020 - 2021**

Komponen Pengeluaran	Proyeksi Pertumbuhan (persen)	
	Tahun 2020	Tahun 2021
1. Konsumsi RumahTangga	4,44	4,50
2. Konsumsi LNPRT	6,53	6,58
3. Konsumsi Pemerintah	3,82	3,85

Komponen Pengeluaran	Proyeksi Pertumbuhan (persen)	
	Tahun 2020	Tahun 2021
4. PMTB	5,15	5,20
5. Perubahan Inventori	5,21	5,25
6. Ekspor	4,38	4,40
7. Import	2,98	2,99

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2019 \*) Proyeksi

Semakin maju perekonomian daerah biasanya ditandai dengan kontribusi sektor primer yang cenderung mengalami penurunan, sedangkan kontribusi sektor sekunder dan sektor tersier menunjukkan peningkatan. Struktur ekonomi biasanya dilihat dengan pendekatan makro sektoral, yaitu berdasarkan kontribusi lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB. Tingkat perubahan struktural yang tinggi, berkaitan dengan proses pertumbuhan ekonomi. Beberapa komponen utama perubahan struktural tersebut mencakup pergeseran yang berangsur-angsur dari aktifitas pertanian ke sektor non pertanian dan dari sektor industri ke sektor jasa. Disamping hal tersebut ketersediaan infrastruktur suatu wilayah juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Proyeksi pertumbuhan yang diharapkan dapat tercapai di tahun 2021 berdasarkan jenis lapangan usaha adalah sebagai berikut.

Proyeksi pertumbuhan komponen pengeluaran PDRB terdampak COVID-19 Kabupaten Tegal Tahun 2020 sebagai berikut.

**Tabel 3.4.**  
**Proyeksi Pertumbuhan Komponen Pengeluaran**  
**PDRB Terdampak COVID -19 Kabupaten Tegal Tahun 2020 - 2021**

Komponen Pengeluaran	Proyeksi Pertumbuhan (persen)	
	Tahun 2020	Tahun 2021
1. Konsumsi RumahTangga	3,79	4,44
2. Konsumsi LNPRT	4,88	6,53
3. Konsumsi Pemerintah	1,95	3,82
4. PMTB	2,55	5,15
5. Perubahan Inventori	2,65	5,21
6. Ekspor	2,15	4,38
7. Import	1,45	2,98

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2019 \*) Proyeksi

Dari sisi domestik, konsumsi rumah tangga diproyeksikan akan mengalami pelemahan akibat penyebaran COVID-19 yang telah menyentuh Kabupaten/Kota di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan. Penurunan kinerja industri memberi dampak terhadap penghasilan tenaga kerja sehingga konsumsi rumah tangga berpotensi mengalami kontraksi hingga sebesar -0,65% (yoy) pada tahun 2020. Meskipun begitu, daya beli diharapkan tidak melemah lebih dalam mempertimbangkan adanya stimulus fiskal dan peningkatan UMK dengan catatan dapat segera direalisasikan.

Selanjutnya, kinerja investasi diperkirakan juga terpengaruh sehingga lebih rendah dari perkiraan semula. Kinerja investasi berpotensi melambat dengan pertumbuhan hanya sebesar 0,93% (yoy) pada tahun 2020. Perlambatan ini didorong kecenderungan tertahannya realisasi penanaman modal di tengah merebaknya virus COVID-19. Beberapa pembangunan proyek infrastruktur diperkirakan mengalami penundaan.

Di sisi lain, sector pertanian, kehutanan dan perikanan diperkirakan membaik. Berdasarkan perkiraan BMKG, tidak ada gangguan iklim dan cuaca sepanjang 2020, sehingga produktivitas pertanian diperkirakan akan mengalami normalisasi ke rerata historisnya.

**Tabel 3.5**  
**Proyeksi Pertumbuhan Lapangan Usaha PDRB**  
**Kabupaten Tegal Tahun 2020 dan 2021**

Lapangan Usaha/Industry		Proyeksi Pertumbuhan (%)	
		Tahun 2020	Tahun 2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,49	1,52
B	Pertambangan dan Penggalian	4,81	5,20
C	Industri Pengolahan	6,85	6,88
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,87	4,80
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,44	4,45
F	Konstruksi	5,99	5,89
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,51	4,53
H	Transportasi dan Pergudangan	6,59	5,62
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,84	6,90
J	Informasi dan Komunikasi	9,65	9,69
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,36	4,38
L	Real Estate	4,38	4,40
M,N	Jasa Perusahaan	6,24	6,26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,49	3,48
P	Jasa Pendidikan	8,46	8,50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,84	8,90
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,76	7,79

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2019 \*) Proyeksi

Proyeksi pertumbuhan lapangan usaha PDRB terdampak COVID-19 Kabupaten Tegal Tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Proyeksi Pertumbuhan Lapangan Usaha PDRB**  
**Kabupaten Tegal Tahun 2020 dan 2021**

Lapangan Usaha/Industry		Proyeksi Pertumbuhan (%)	
		Tahun 2020	Tahun 2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,35	1,49
B	Pertambangan dan Penggalian	3,42	4,81
C	Industri Pengolahan	4,90	6,85
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,85	4,87
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,35	4,44
F	Konstruksi	3,89	5,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,26	4,51
H	Transportasi dan Pergudangan	3,67	6,59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,12	6,84
J	Informasi dan Komunikasi	9,34	9,65
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,30	4,36
L	Real Estate	4,35	4,38

Lapangan Usaha/Industry		Proyeksi Pertumbuhan (%)	
		Tahun 2020	Tahun 2021
M,N	Jasa Perusahaan	5,85	6,24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,88	3,49
P	Jasa Pendidikan	6,34	8,46
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,96	8,84
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,65	7,76

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2020\*) Proyeksi

Guna mencapai proyeksi pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan identifikasi tantangan, peluang dan arah kebijakan untuk mewujudkan proyeksi dimaksud. **Tantangan** ekonomi Kabupaten Tegal serta dampak *COVID-19* diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perlambatan ekonomi dampak *COVID-19*  
Perekonomian tahun 2020 dan 2021 diproyeksikan melambat karena dampak *COVID-19*. *Social and phisical distancing* menyebabkan aktivitas perekonomian cenderung stagnan sehingga pola distribusi, konsumsi dan investasi akan mengalami perlambatan.
2. Persaingan pasar global  
Rezim pasar bebas hari ini dari yang bersifat internasional seperti AFTA maupun yang regional seperti MEA mendorong daerah mempersiapkan diri untuk bersaing dan berkompetisi. Deregulasi terhadap arus masuk produk hingga tenaga kerja asing akan menjadikan persaingan pasar tidak hanya terjadi di dalam pasar internasional, tetapi sudah berlangsung pada proses produksi di dalam negeri. Pasca *COVID-19* dimungkinkan arus ekspor antar daerah atau antar negara produk lokal Tegal akan mengalami kendala berupa kesulitan produksi dan kesulitan distribusi.
3. Ketersediaan bahan baku industri  
Dalam konsepsi kedaulatan industri daerah, bahan baku industri seyogyanya tersedia dalam jumlah cukup di daerah. Ketersediaan ini diperlukan untuk menjamin kelangsungan produksi. Ketersediaan yang dimaksud dapat berupa peningkatan upaya produksi maupun ketersediaan pasokan bahan baku. Dampak *COVID-19* terhadap ketersediaan bahan baku adalah persoalan kesulitan dalam penyediaan stok bahan baku tekstil, logam dan furniture serta beban biaya operasional yang cukup tinggi dalam proses produksi menjadi masalah di sektor industri.
4. Peningkatan investasi  
Iklim investasi yang kondusif masih perlu didorong untuk tumbuh dan diwujudkan di daerah. Kewenangan, kelembagaan, hingga prosedur investasi yang efisien akan mendorong investor menanamkan modal di daerah. Perlambatan ini didorong kecenderungan tertahannya realisasi penanaman modal di tengah merebaknya virus *COVID-19*. Beberapa pembangunan proyek infrastruktur diperkirakan mengalami penundaan.
5. Laju konversi lahan pertanian  
Kebutuhan pemanfaatan ruang budidaya seiring laju perkembangan manusia harus diikuti dengan konversi lahan, karena lahan yang tersedia bersifat tetap sementara perubahan bersifat dinamis. Sebagai kota yang sedang tumbuh, Slawi dan kota-kota kecamatan lainnya membutuhkan ruang budidaya yang memadai untuk kelengkapan sarana perkotaan seperti permukiman, pendidikan, hingga perdagangan. Lahan-lahan yang dialokasikan dalam pola ruang yang ada diakui menyebabkan konversi lahan pertanian.
6. Kesiapan sebagai destinasi internasional  
Kabupaten Tegal terus menyiapkan diri sebagai kawasan destinasi nasional maupun internasional. Tren kunjungan wisatawan yang meningkat perlu diiringi dengan kesiapan sarana, prasarana hingga infrastruktur sosial sehingga wisatawan yang singgah di Kabupaten Tegal dapat merasa *mbetahi* dan *ngangeni*. Namun dampak *COVID-19* paling serius menghajar sektor pariwisata sebagai sektor tersier masyarakat. Luka-luka dampak *COVID-19* diperkirakan belum sembuh benar pada tahun 2021.

## 7. Kualitas sumber daya manusia

Secara kuantitas, penduduk Kabupaten Tegal unggul dalam hal jumlah. Sehingga sebagaimana yang dipaparkan dalam bab sebelumnya, Kabupaten Tegal punya potens sumberdaya manusia yang melimpah. Besarnya jumlah merupakan pasar yang cukup potensial bagi pengembangan ekonomi. Tetapi dari sisi kualitas, kondisi sumber daya manusia di Kabupaten Tegal belum cukup menggembirakan. Kondisi ini bisa dilihat dari pendidikan terakhir yang ditamatkan atau ijazah terakhir yang dimiliki oleh penduduk di Kabupaten Tegal. Dari pendidikan yang tertinggi yang ditamatkan, pada tahun 2019 penduduk Kabupaten Tegal masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah, Tercatat sebesar 54,53 persen penduduk yang bekerja. Angka yang cukup besar dan berpotensi menyumbang angka pengangguran baru, terutama akibat melemahnya perekonomian pasca *COVID-19*.

Tantangan yang ada tidak berdiri tunggal. Di sebelahny terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan agar tantangan dapat dieliminasi sekaligus agar potensi dapat dikembangkan. Beberapa **peluang** pembangunan ekonomi di Kabupaten Tegal antara lain sebagai berikut:

### 1. Kebijakan stimulus ekonomi pasca *COVID-19*

Kebijakan stimulus ekonomi *COVID-19* dilakukan sejak tahun 2020, berupa penanggulangan di bidang kesehatan, sosial dan rehabilitasi dan rekonstruksi ekonomi. Stimulus ekonomi berupa tax holiday; insentif modal; deregulasi investasi, produksi hingga distribusi dari level nasional, provinsi maupun daerah diharapkan dapat mengungkit perekonomian di tahun 2021.

### 2. Migrasi investasi dari ibukota

Tingginya faktor produksi bagi investasi di wilayah Jabodetabek mendorong investor mengalihkan usahanya ke wilayah Jawa Tengah. Kabupaten Tegal sebagai “pintu gerbang” Jawa Tengah wilayah barat menawarkan insentif strategis bagi investor. Kabupaten Tegal tidak terlampaui jauh dengan ibukota, sehingga arus lalu lintas produksi dari pabrik asal tidak terlampaui jauh. Upah Minimum Kabupaten (UMK) masih kompetitif, mengingat tingkat inflasi dan kemahalan harga yang terkendali. Dari aspek tata ruang, telah dialokasikan pola ruang kawasan industri di Kecamatan Margasari dan pantura dalam Rancangan RTRW.

### 3. Jalur tol yang melintasi wilayah kabupaten

Keberadaan jalan tol yang melintasi wilayah kabupaten akan membuka aksesibilitas yang lebih terbuka bagi masyarakat dan pelaku usaha. Lalu lintas perdagangan, industri, hasil usaha pertanian hingga UMKM semakin terbuka. Dengan sendirinya jalan tol akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

### 4. Tumbuhnya destinasi baru berbasis masyarakat

Industri pariwisata dalam dekade terakhir sedang tumbuh dan bergairah. Menariknya, industri pariwisata yang sedang berkembang saat ini berbasis masyarakat dalam konsep wisata desa. Destinasi-destinasi baru yang tumbuh menjadi alternatif bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tegal.

### 5. Luasnya pasar domestik

“Ekspor” Kabupaten Tegal di wilayah regional dan nasional merupakan salah satu pilar perekonomian masyarakat. Produk-produk unggulan Kabupaten Tegal di bidang komponen otomotif, komponen kapal hingga komponen mesin telah dikenal luas oleh publik. Sebagai keunggulan kompetitif, produk unggulan komponen kapal telah memiliki sertifikasi internasional Badan Klasifikasi Indonesia (BKI), dengan kualitas setara Standar Nasional Indonesia (SNI)

### 6. Keberadaan sarana unggulan

Sarana yang dimiliki Kabupaten Tegal memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang cukup baik di tingkat regional maupun nasional. Laboratorium Material Non Fero di Lingkungan Industri Kecil (LIK) Takaru Tegal merupakan salah satu lab terbaik nasional di bidang material non fero. Keberadaan Taman Teknologi Pertanian (TTP) dapat menjadi wahana litbang pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

#### 7. Iklim investasi yang sehat

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan lembaga yang mengintegrasikan upaya mendorong investasi dan mengeluarkan pelbagai izin usaha. Kelembagaan yang terintegrasi ini mendorong terbangunnya iklim investasi yang sehat, yaitu mudah, murah, dan efisien.

Memperhatikan kondisi eksisting yang ada upaya mendorong pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tegal tahun 2021 sesuai dengan Target sebesar 5,53% dapat tercapai dengan asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah Kabupaten Tegal yang mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk rekonstruksi pasca *COVID-19*
2. Stabilitasnya tingkat perkembangan industri pengolahan di Kabupaten Tegal baik industri yang berskala kecil (UMKM) maupun industri yang banyak menyerap tenaga kerja
3. Tingkat investasi semakin meningkat seiring dengan banyaknya perusahaan yang berpindah ke Daerah dari kawasan Jabodetabek
4. Lokasi industri yang ada di wilayah pantura dan Kecamatan Margasari semakin berkembang
5. Dibukanya jalan tol menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi karena dapat memudahkan akses bahan baku
6. Kondisi perekonomian/lingkungan investasi regional Jawa Tengah stabil dan daya saing lokal yang semakin menguat di wilayah regional
7. Perda revisi RTRW Kabupaten Tegal sehingga dapat menjadi acuan lokasi investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta
8. Pertumbuhan belanja modal yang dialokasikan melalui APBD dan APBDes
9. Kecepatan layanan dalam berinvestasi

Sementara **arah kebijakan** untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan prioritas pada sektor kontribusi terbesar dalam PDRB (pertanian, industri, perdagangan)  
Program dan kegiatan pembangunan setelah urusan wajib pelayanan dasar diprioritaskan pada urusan pertanian, perindustrian dan perdagangan. Prioritas pada urusan-urusan ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor pertanian, industri dan perdagangan.
2. Meningkatkan konsumsi masyarakat  
PDRB Kabupaten Tegal bertumpu pada konsumsi masyarakat. Untuk menjamin keberlanjutan konsumsi masyarakat program dan kegiatan pembangunan diarahkan untuk upaya peningkatan pendapatan masyarakat.
3. Menurunkan kemiskinan  
Meskipun capaian kinerja kemiskinan Kabupaten Tegal relatif baik di rata-rata Jawa Tengah dan nasional, upaya penurunan kemiskinan melalui upaya mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat merupakan fondasi pembangunan di Kabupaten Tegal.
4. Melakukan revisi tata ruang  
RTRW yang sedang direvisi perlu menjamin pola ruang yang cukup bagi investasi. Legalitas pola ruang investasi di wilayah pantura dan Kecamatan Margasari ditandai dengan upaya revisi RTRW.
5. Mewujudkan iklim investasi yang sehat  
Iklim investasi yang ramah, mudah, mudah dan efisien perlu terus menjadi perhatian. Tidak hanya DPMPTSP sebagai garda depan investasi, tetapi juga semua pihak perlu mewujudkan investasi yang sehat di Kabupaten Tegal. Deregulasi dan sistem insentif menjadi prioritas pembangunan ekonomi Kabupaten Tegal.

6. Menumbuhkan kewirausahaan pemuda  
Upaya mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pendapatan berbasis masyarakat akan diprioritaskan pada kelompok umur pemuda. Pemuda dengan harapan hidup yang masih panjang akan menjadi pilar sumber daya pembangunan daerah. Kewirausahaan pemuda akan didesain berbasis inkubator bisnis yang mendidik pemuda menjadi wirausaha. Pemuda-pemuda yang telah dilatih juga terbuka kemungkinan untuk memiliki keahlian dan keterampilan sebagai tenaga kerja terdidik.
7. Menjamin ketersediaan produksi dan pasokan karbohidrat dan protein  
Konsumsi karbohidrat dan protein yang cukup akan menjamin kualitas kesehatan masyarakat. Program dan kegiatan pembangunan akan diarahkan untuk menjamin ketersediaan produksi dan pasokan karbohidrat untuk kecukupan gizi seimbang masyarakat.
8. Mendorong konsumsi karbohidrat dan protein  
Selain ketersediaan, konsumsi karbohidrat dan protein menjadi perhatian pemerintah yang akan difasilitasi melalui program dan kegiatan. Kampanye dan penyediaan bahan pangan karbohidrat dan protein telah menjadi agenda pemerintah daerah.
9. Meningkatkan infrastruktur pendukung ekonomi lokal (wisata, usaha tani, perdagangan)  
Infrastruktur pendukung ekonomi lokal akan terus ditingkatkan kualitasnya. Sehingga produk pariwisata, usaha tani, dan perdagangan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan murah.
10. Meningkatkan promosi potensi daerah  
Promosi potensi daerah menjadi prioritas pembangunan untuk memberi akses informasi, komunikasi dan pada akhirnya investasi yang mudah, murah dan profesional bagi calon investor.
11. Pengendalian inflasi  
Pengendalian inflasi akan diintervensi melalui dua strategi utama, yaitu menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan dasar masyarakat serta menjamin ketersediaan infrastruktur. Ketersediaan pasokan akan mengendalikan harga sementara ketersediaan infrastruktur akan menekan distribusi berbiaya tinggi.
12. Meningkatkan investasi pemerintah  
Investasi pemerintah akan diwujudkan dalam peningkatan belanja modal pemerintah. Belanja modal pemerintah di samping menekan biaya produksi dan distribusi masyarakat, sekaligus menjadi investasi pembangunan untuk meningkatkan serapan tenaga kerja dalam pembangunan proyek strategis daerah.
13. Merintis skema pendanaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership* (PPP)  
Untuk melakukan pembangunan infrastruktur strategis yang membutuhkan pendanaan besar pemerintah akan merintis skema pendanaan KPBU. Dengan skema ini, badan usaha akan melakukan pembangunan dan perawatan fasilitas publik strategis sementara pemerintah berperan selaku operator. Badan usaha memperoleh pendapatan melalui penetapan tarif yang layak oleh pemerintah atau pembayaran cicilan termin pekerjaan dari pemerintah selama jangka waktu kontrak. Setelah kontrak kerja berakhir, infrastruktur publik strategis akan dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah.

### **3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendanaan pembangunan memerlukan sumber-sumber penerimaan yang memadai untuk menjamin ketersediaan dana dalam periode waktu tertentu. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan umum yang tepat dalam menentukan arah penggalan penerimaan daerah dalam periode tahun 2021 sebagai sumber pendapatan daerah. Kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Tegal dalam RKPD tahun 2021 adalah berupa kerangka pikir yang bersifat umum sebagai kebijakan periodik tahunan dalam pelaksanaannya. Untuk itu kebijakan umum pendapatan daerah harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan arah

penggalan pendapatan dalam tahun 2021 berdasarkan kondisi yang telah berjalan dalam periode lima tahun sebelumnya. Kebijakan umum pendapatan daerah adalah disesuaikan dengan struktur dan sumber-sumber penerimaannya. Adapun kebijakan umum dari pendapatan daerah tersebut adalah:

1. Kebijakan Umum Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal (PAD)
  - a. Meningkatkan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan perbaikan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - b. Optimalisasi pengelolaan objek-objek dengan pihak ketiga yang telah kembali kepada pemerintah daerah (pasar trayeman, pasar banjaran, asset asset diobjek wisata guci).
  - c. Optimalisasi penarikan pajak jalan tol dan depo pertamina munjung agung.
  - d. Penerapan e-tiketing objek wisata dan pasar.
  - e. Kerjasama pihak lain dalam intensifikasi potensi pendapatan (data layanan pelanggan).
  - f. Mengoptimalkan penerimaan PAD melalui perolehan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Badan Usaha Milik Daerah yaitu PDAM, BPR-BKK dan Bank Jateng berupa perolehan laba maupun penyertaan modal.
  - g. Mengalokasikan tambahan penerimaan daerah berupa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan mengoptimalkan manajemen kas daerah dan pengelolaan aset-aset daerah yang berpotensi memberikan sumber-sumber penerimaan bagi pendapatan asli daerah.
  - h. Mengupayakan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Tahun 2021 merupakan masa pemulihan dari pandemi *corona virus disease 2019 (COVID-19)*. Hal ini mempengaruhi kebijakan pendapatan asli daerah tahun 2021 sebagai dampak dari pandemi *COVID-19* yang mengakibatkan pendapatan asli daerah akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Proyeksi pendapatan asli daerah tahun 2021 tidak berbeda jauh dengan proyeksi pendapatan asli daerah tahun 2020 akibat dampak dari pandemi *COVID-19* yang disebabkan beberapa sektor yang menjadi penyokong utama pendapatan asli daerah mengalami penurunan penerimaan baik dari pajak dan retribusi.

2. Kebijakan umum sumber pendanaan transfer daerah (Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah)
  - a. Peningkatan kualitas Proposal, KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan TOR (Term Of Reference) dalam pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik dan kepentingan daerah.
  - b. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan lainnya dari pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak untuk menjamin dan menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan daerah.
  - c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan dana perimbangan khususnya terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana perimbangan.
  - d. Mengupayakan adanya penerimaan dana hibah dari pemerintah pusat sebagai sumber penerimaan daerah.
  - e. Peningkatan kualitas prasyarat Dana Intensif Daerah (DID). DID dialokasikan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja. Kriteria utama digunakan untuk menentukan kelayakan suatu daerah menerima DID dengan indikator: opini BPK WTP/WDP serta penetapan Perda APBD tepat waktu. Sementara kriteria kinerja digunakan menilai kinerja daerah berdasarkan variabel kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah (50%), kinerja pelayanan publik dasar (25%) dan kinerja ekonomi kesejahteraan (25%).
  - f. Melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi sebagai upaya penjaminan ketersediaan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi dan dana bantuan keuangan dari provinsi.

Selain pendapatan asli daerah yang mengalami penurunan, kondisi keuangan Pemerintah Pusat tahun 2020 ikut terdampak akibat pandemik *COVID-19*. Untuk tahun 2020 pendapatan dari sumber pendanaan transfer daerah telah dilakukan penyesuaian oleh Pemerintah Pusat dengan mengurangi transfer ke daerah. Hal tersebut mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penyesuaian pendapatan yang bersumber dari transfer Pemerintah Pusat.

APBD tahun 2020 telah dilakukan langkah *refocusing* anggaran untuk pendanaan penanganan *covid-19* dan penyesuaian penurunan pendapatan. Proyeksi pendapatan daerah tahun 2021 dari dana transfer Pemerintah Pusat sama dengan transfer dana dari Pemerintah Pusat untuk tahun 2020 sebagai dampak pandemik *COVID-19*.

Berdasarkan pertimbangan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam kurun waktu lima tahun sebelumnya dan dampak pandemik *COVID-19* maka dapat diperhitungkan proyeksi penerimaan daerah Kabupaten Tegal tahun 2021 berdasarkan pada rata-rata pertumbuhannya dalam Tabel 3.6 berikut.

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 - 2019**  
**dan APBD 2020**

No	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	APBD 2020 (Hasil Refocusing)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.450.766.552.130</b>	<b>2.524.365.919.814</b>	<b>2.755.658.770.896</b>	<b>2.647.934.908.000</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>375.531.165.351</b>	<b>372.282.676.054</b>	<b>435.984.679.157</b>	<b>427.035.190.000</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	96.425.287.892	107.035.473.258	122.789.736.901	121.975.102.000
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	20.047.124.895	17.833.906.345	25.207.739.921	27.613.086.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	25.475.140.654	12.576.924.389	22.395.196.773	13.470.000.000
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	233.583.611.910	234.836.372.062	265.592.005.562,29	263.977.002.000
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.505.671.807.702</b>	<b>1.513.203.330.274</b>	<b>1.586.668.848.339</b>	<b>1.469.760.197.000</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	38.360.380.613	29.421.275.289	22.161.572.062	33.203.096.000
1.2.3	Dana Alokasi Umum	1.141.687.714.000	1.144.494.182.000	1.198.561.641.000	1.097.564.744.000
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	325.623.713.089	339.287.872.985	365.945.635.277	338.992.357.000
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>569.563.579.077</b>	<b>638.879.913.486</b>	<b>733.005.243.400</b>	<b>751.139.521.000</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	153.666.800.582	143.496.517.552	141.111.559.559	148.846.800.000
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	164.221.871.495	167.207.542.937	173.568.253.580	187.751.958.000
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi	17.648.608.000	10.472.690.000	32.790.052.264	6.407.000.000
1.3.5	DID		35.000.000.000	44.577.009.000	49.821.810.000
1.3.4	Dana Desa dari Pem pusat	234.026.299.000	282.703.162.997	340.958.368.997	358.311.953.000

Sumber : Bappeda & Litbang dan BPKAD Kabupaten Tegal, Tahun 2020

**Tabel 3.8**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021**

No	Pendapatan Daerah	2021
<b>1.</b>	<b>PAD</b>	<b>431.306.106.000</b>
a.	Pendapatan Pajak Daerah	133.050.000.000
b.	Pendapatan Retribusi Daerah	20.427.151.000
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.470.000.000
d.	Lain-lain PAD yang Sah	264.358.864.000
<b>2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.113.646.169.000</b>
a.	Transfer Pemerintah Pusat	1.932.413.886.000
b.	Transfer Antar Daerah	174.232.283.000
<b>3.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>153.329.800.000</b>
	<b>TOTAL PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)</b>	<b>2.698.282.075.000</b>

Sumber : Bappeda & Litbang dan BPKAD Kabupaten Tegal, Tahun 2020

## b. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pemanfaatan pendapatan daerah adalah melalui penggunaan dana untuk keperluan belanja daerah. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan umum belanja daerah yang berdasarkan pada pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap OPD berdasarkan pada hasil pengelolaan keuangan lima tahun sebelumnya. Kebijakan umum Belanja Daerah dalam RKPD Kabupaten Tegal tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Belanja daerah dialokasikan untuk dapat mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan berupa urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Kabupaten Tegal.
2. Alokasi belanja daerah adalah untuk pemenuhan kepentingan publik dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
3. Alokasi Belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat Kabupaten Tegal di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan sosial dan pemerintahan umum untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sejalan dengan agenda reformasi birokrasi.
4. Alokasi Belanja Daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan pilihan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi daerah sesuai dengan karakteristik kewilayahan di Kabupaten Tegal.
5. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka menguatkan program-program yang mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kewilayahan.

Struktur Belanja Daerah adalah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kebijakan umum untuk Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai diarahkan pada pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan PNS Kabupaten Tegal sesuai dengan perkembangan jumlahnya, kenaikan gaji pokok, kenaikan gaji berkala serta pemberian gaji bulan ketigabelas dan tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peningkatan DD/ADD
3. Belanja Hibah didorong untuk peningkatan sarpras kualitas pendidikan
4. Belanja Bantuan Sosial diutamakan menangani masalah sosial dan kemiskinan
5. Belanja Bantuan Sosial dan Hibah dialokasikan secara selektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku
6. Bantuan khusus keuangan desa untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemiskinan, pengembangan cadangan pangan desa, dan sarpras olahraga desa
7. Belanja bagi hasil dimaksudkan pemenuhan peraturan perundangan
8. Belanja tidak terduga diharapkan untuk menangani hal-hal bersifat darurat dan mendesak

Sedangkan kebijakan umum untuk Belanja Langsung adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai dialokasikan untuk mendorong kinerja pegawai dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi untuk setiap OPD melalui pemberian honorarium PNS dan non PNS, pemberian uang lembur dan komponen belanja pegawai lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Memenuhi persentase alokasi belanja berdasarkan peraturan perundangan fungsi pendidikan, kesehatan, dll.
3. Meningkatkan alokasi belanja modal untuk dapat menambah aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang dimanfaatkan untuk sebesar-besar kepentingan pelayanan kepada masyarakat.
4. Meningkatkan alokasi belanja jaminan social.
5. Meningkatkan alokasi belanja program berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.

6. Memenuhi program prioritas.
7. Diarahkan untuk pemenuhan infrastruktur umum, sosial, dan ekonomi.

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi guna mengejar target RPJMN 2020-2024, untuk itu tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan formasi sosial dengan fokus pada pemulihan industri pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengamanan sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana.

Terjadinya pandemi *COVID-19* yang menyebabkan *refocusing* anggaran pada tahun 2020, target RKPD tahun 2020 tidak sama dengan target pada RPJMD 2019-2024. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021, kebijakan belanja daerah berbeda dengan kebijakan belanja daerah pada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan belanja daerah tahun 2021 akan mengakomodir belanja pada tahun sebelumnya yang tidak dilaksanakan akibat adanya *refocusing* anggaran dan adanya kegiatan *recovery* dampak pandemi *COVID-19*. Adapun kebijakan belanja daerah tersebut diantaranya adalah :

1. Pagu anggaran OPD dikurangi 15% dari pagu awal yang telah ditetapkan;
2. Kegiatan tahun 2020 yang tidak dilaksanakan 100% untuk diakomodir ditahun 2021;
3. Kegiatan yang bersumber dari musrenbang tematik;
4. Kegiatan yang merupakan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati;
5. Kegiatan rutin usulan OPD untuk tahun 2021;
6. Kegiatan dari hasil penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
7. Kegiatan dari dana PIK tahun 2018 dan 2019;
8. Kegiatan *recovery* baik berupa kegiatan yang bersifat stimulan usaha ataupun melalui kegiatan yang bersifat padat karya; dan
9. Adanya kebijakan Bupati terkait himbauan untuk penggunaan produk lokal (sandang dan pangan) dan pengendalian produk lokal dan penerapan sanksi bagi pelanggaranya.

Berdasarkan arah kebijakan belanja daerah maka asumsi belanja tidak langsung dan belanja langsung Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2021 adalah dapat dilihat sebagaimana Tabel 3.7 dan Tabel 3.8 berikut.

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 – 2019**  
**dan APBD Tahun 2020**

No.	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	APBD 2020 (Hasil Refocusing)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
<b>2</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>2.453.004.538.262</b>	<b>2.575.620.503.042</b>	<b>2.717.431.598.854,15</b>	<b>2.664.702.406.000</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.435.900.459.681</b>	<b>1.535.069.649.370</b>	<b>1.592.942.885.960</b>	<b>1.765.000.283.000</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	969.159.817.411	999.962.632.254	1.022.372.324.804	1.035.944.392.000
2.1.3	Belanja Hibah	46.171.465.900	62.658.367.142	39.818.765.000	36.981.100.000
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	16.837.300.000	20.064.800.000	23.781.900.000	17.850.000.000
2.1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	9.980.183.500	9.012.448.100	8.243.113.740	19.000.000.000
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/ Kab/Kota, Pemdes dan Parpol	386.059.908.954	439.235.325.874	498.725.282.416	498.269.603.000
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	7.691.783.916	4.136.076.000	1.500.000	156.955.188.000
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.017.104.078.581</b>	<b>1.040.550.853.672</b>	<b>1.124.488.712.894,15</b>	<b>899.702.123.000</b>

Sumber : Bappeda & Litbang dan BPKAD Kabupaten Tegal, Tahun 2020

**Tabel 3.10**  
**Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021**

No	Belanja Daerah	2021
<b>1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.926.266.801.900</b>
a.	Belanja Pegawai	1.174.477.997.000
b.	Belanja Barang dan Jasa	727.585.502.000
c.	Belanja Hibah	75.130.245.000
d.	Belanja Bantuan Sosial	4.278.000.000
<b>2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>324.729.207.000</b>
<b>3.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>10.000.000.000</b>
<b>4.</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>529.396.387.000</b>
	<b>TOTAL BELANJA DAERAH (1+2+3+4)</b>	<b>2.845.597.338.000</b>

Sumber : Bappeda & Litbang dan BPKAD Kabupaten Tegal, Tahun 2020

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah pemanfaatan sumber-sumber dana yang dapat memberikan nilai tambah ekonomis bagi daerah atau menimbulkan kewajiban ekonomis bagi daerah. Pembiayaan daerah dialokasikan untuk dapat menutup defisit anggaran akibat lebih besarnya alokasi belanja daerah dibanding dengan pendapatan daerah yang bersumber dari pinjaman daerah atau pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Disisi lain apabila terdapat surplus maka pembiayaan daerah juga dapat dialokasikan untuk penyertaan modal dari pemerintah daerah pada BUMD maupun lembaga usaha lain yang dapat memberi nilai tambah ekonomis bagi Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku atau pembentukan dana cadangan yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah daerah untuk keperluan tertentu seperti Pemilihan Kepala Daerah.

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayarkan kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya dan penerimaan lain yang bukan merupakan pendapatan daerah. Kebijakan umum untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2021 adalah :

1. Penyertaan modal Bank Jateng sesuai dengan RUPS
2. Penggunaan SiLPA adalah sebagai sumber penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran berikutnya dalam rangka mendanai kegiatan-kegiatan yang belum selesai pada tahun anggaran berkenaan maupun penggunaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi defisit anggaran riil maka diupayakan untuk menutup defisit melalui :
  - a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa pelepasan saham ataupun penjualan aset pemerintah daerah lainnya pada BUMD maupun lembaga usaha lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Penerimaan pinjaman daerah dari pihak lain baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun lembaga donor yang dimanfaatkan untuk keperluan pendanaan kegiatan jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan perturan perundangan yang berlaku.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya.

**Tabel 3.11**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 – 2019**  
**dan Proyeksi Tahun 2020-2021**

No.	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	APBD 2020 (Hasil Refocusing)	RKPD 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<b>3</b>	<b>Pembiayaan Daerah</b>					
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Daerah</b>	<b>133.104.079.627</b>	<b>119.976.862.486</b>	<b>60.034.997.598,82</b>	<b>30.767.498.000</b>	<b>159.815.263.000</b>
3.1.1	Penggunaan SILPA	119.670.200.252	106.925.093.495	59.879.097.965,82	30.767.498.000	159.815.263.000
3.1.3	Pencairan Dana Cadangan	13.159.458.900	12.840.541.100	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	274.420.475	211.227.891	155.899.633	-	-
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>23.941.000.000</b>	<b>8.878.000.000</b>	<b>9.349.000.000</b>	<b>14.000.000.000</b>	<b>12.500.000.000</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000	-	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	13.941.000.000	8.849.000.000	9.349.000.000	14.000.000.000	10.000.000.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	2.500.000.000
3.2.5	Pengembalian Biaya Administrasi Pembukaan Rekening BLUD Puskesmas	-	29.000.000	-	-	
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>109.163.079.627</b>	<b>111.098.862.486</b>	<b>50.685.997.598,82</b>	<b>16.767.498.000</b>	<b>147.315.263.000</b>

Sumber : Bappeda & Litbang dan BPKAD Kabupaten Tegal, Tahun 2020